



PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI
SPBE BAGI PRANATA KOMPUTER
ANGKATAN I TAHUN 2024

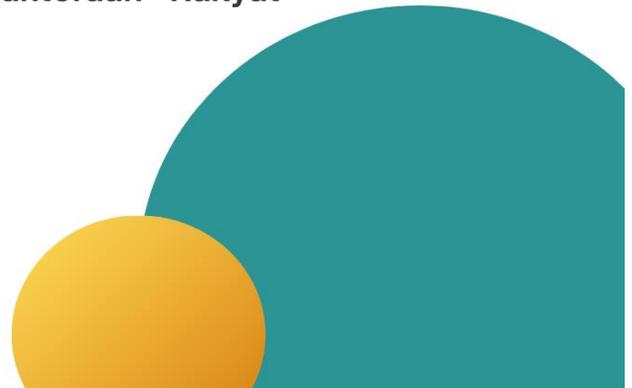


LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Proses Bisnis Layanan Dana Hibah Lembaga
Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Bantul

Disusun Oleh:

Naumi Imayanti, A. Md
PeI-SPBE/ANGKATAN I/2024
NIP. 198707172020122009



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II. PEMBAHASAN..... | 5 |
| BAB III. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT | 11 |
| BAB IV. KESIMPULAN | 16 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 17 |
| LAMPIRAN..... | 18 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas secara konsisten yang memiliki tujuan spesifik untuk membawa hasil maksimal terhadap pertumbuhan bisnis. Di dalam proses bisnis terdapat sejumlah pengoperasian sistem serta sumber daya manusia yang mendukung setiap fungsi dan tugas-tugas bisnis tersebut berjalan dengan baik.

Proses bisnis berfungsi sebagai pendekatan sistematis yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan. Proses bisnis juga membantu untuk memetakan setiap tugas dan aktivitas untuk memaksimalkan atau membuat setiap fungsi menjadi efektif. Selain itu, proses bisnis juga memberikan pandangan yang jelas untuk memahami cara kerja yang lebih baik.

Proses bisnis yang baik memiliki komponen-komponen yang mendukung atas menjadi landasan dalam beroperasi. Berikut adalah komponen proses bisnis yang perlu diketahui.

- a) **Input** merupakan material yang memicu terjadinya suatu reaksi. Di mana dalam proses bisnis komponen input memiliki tiga aspek yang memengaruhi input tersebut. Pertama adalah sumber daya manusia yang berperan untuk memberikan kontribusi seperti bakat dan sikap yang benar untuk menggerakkan organisasi.
- b) **Aktivitas** harus memahami sudut pandang sistem, artinya dapat melakukan dan menjalankan setiap urutan proses bisnis dengan baik dan sesuai SOP. Selain itu, keseluruhan bagian-bagian tugas dan fungsinya dapat tercapai dan lebih optimal.
- c) **Output** merujuk kepada efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis di mana secara keseluruhan akan memengaruhi dan membantu untuk mengevaluasi proses bisnis yang telah berjalan.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

- TUJUAN

Tujuan dari pembuatan proses bisnis layanan pemberian dana hibah bagi Lembaga keagamaan adalah:

- ✓ OPD dapat memantau sejauh mana proses layanan berjalan;
- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- ✓ Seluruh pegawai dapat mengetahui alur serta proses kegiatan layanan ;
- ✓ Sebagai alat bantu untuk mengecek pelaksanaan kegiatan;
- ✓ Pembagian tugas dan fungsi pegawai dalam proses kegiatan layanan;
- ✓ Sebagai alat bantu untuk melaksanakan evaluasi proses bisnis.
- ✓ Membangun dan meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat

- MANFAAT

Manfaat proses bisnis layanan pemberian dana hibah bagi Lembaga keagamaan adalah:

- ✓ Mencegah terjadinya kesalahan teknis dan munculnya risiko serta mengurangi inefisiensi;
- ✓ Mengurangi munculnya pengeluaran yang tidak terencana;
- ✓ Meningkatkan pelayanan karena berorientasi pada konsumen;
- ✓ Mengurangi *human error*;
- ✓ Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- ✓ Waktu rangkaian pelayanan terkelola dengan lebih baik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Bagian kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021, Bagian Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dan berada dalam koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian

B. VISI DAN MISI

- Visi Pemerintah Kabupaten Bantul

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

- Misi Pemerintah Kabupaten Bantul

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel. 3

C. TUGAS DAN FUNGSI

a) Tugas

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

b) Fungsi

- ✓ penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;

- ✓ penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
- ✓ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;

- ✓ penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi,
- ✓ ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ pelaksanaan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu 3 sub kegiatan yaitu:

1. Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual

- Tugas

Kelompok Substansi Bina mental spiritual mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keagamaan.

- Fungsi

Kelompok Bina mental Spiritual mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan;
4. Penyiapan bahan pembinaan administrasi di bidang keagamaan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji;
6. Penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan;
7. Penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
8. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
9. Penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
10. Penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan;
11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
12. Pelaksanaan ketatausahaan Bagian;

13. Fasilitasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bagian;
14. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
15. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
16. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat

- Tugas

Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial.

- Fungsi

Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Penyiapan bahan pembinaan administrasi di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial

- Tugas

Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat.

- Fungsi

Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
4. Penyiapan bahan pembinaan administrasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas dan fungsi Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

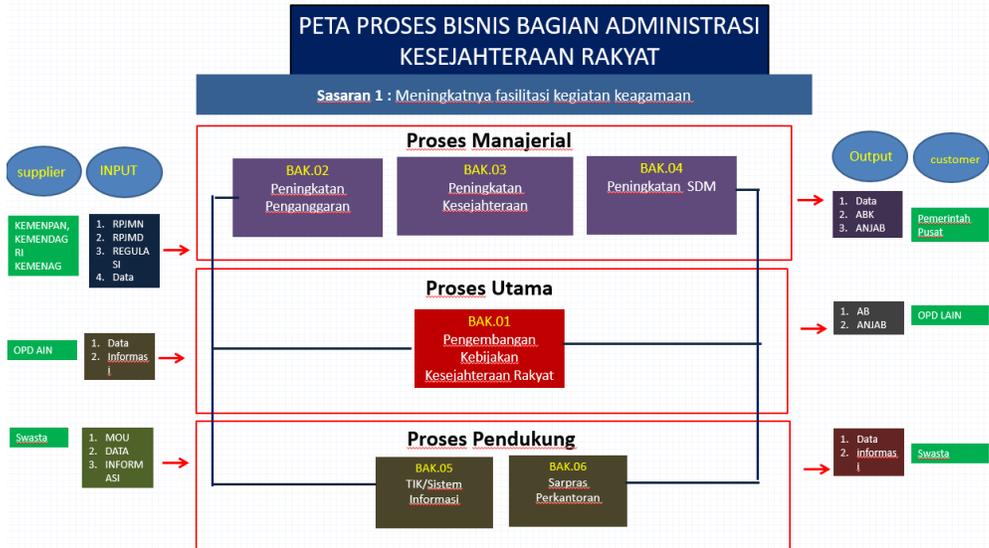
D. RENCANA RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam Laporan ini Rencana Tindak Lanjut yang akan dibuat adalah proses bisnis Layanan Dana Hibah Lembaga Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Rencana Tindak lanjut (RTL) dibuat sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan oleh Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Bantul dapat meningkat. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam pembuatan RTL adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA KEGIATAN | WAKTU YANG DIBUTUHKAN | LOKASI |
|-----------|--|------------------------------|--|
| 1 | Pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait | 9 hari | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul |
| 2 | Perancangan proses bisnis layanan bantuan dana hibah Lembaga keagamaan | 2 minggu | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul |

E. REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Pemetaan Proses Bisnis

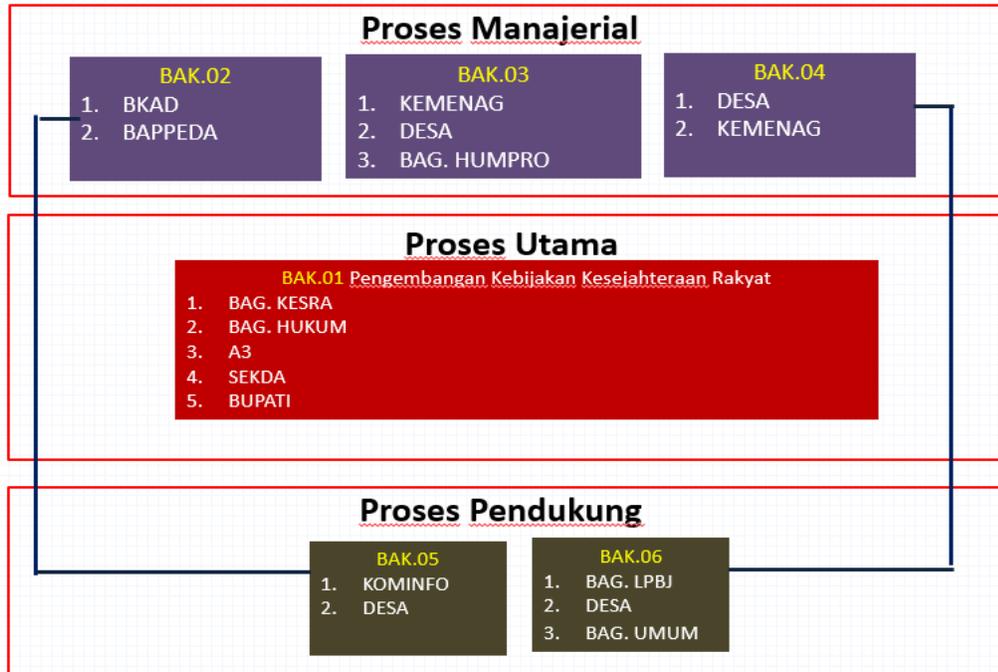


Peta Sub Proses Bisnis

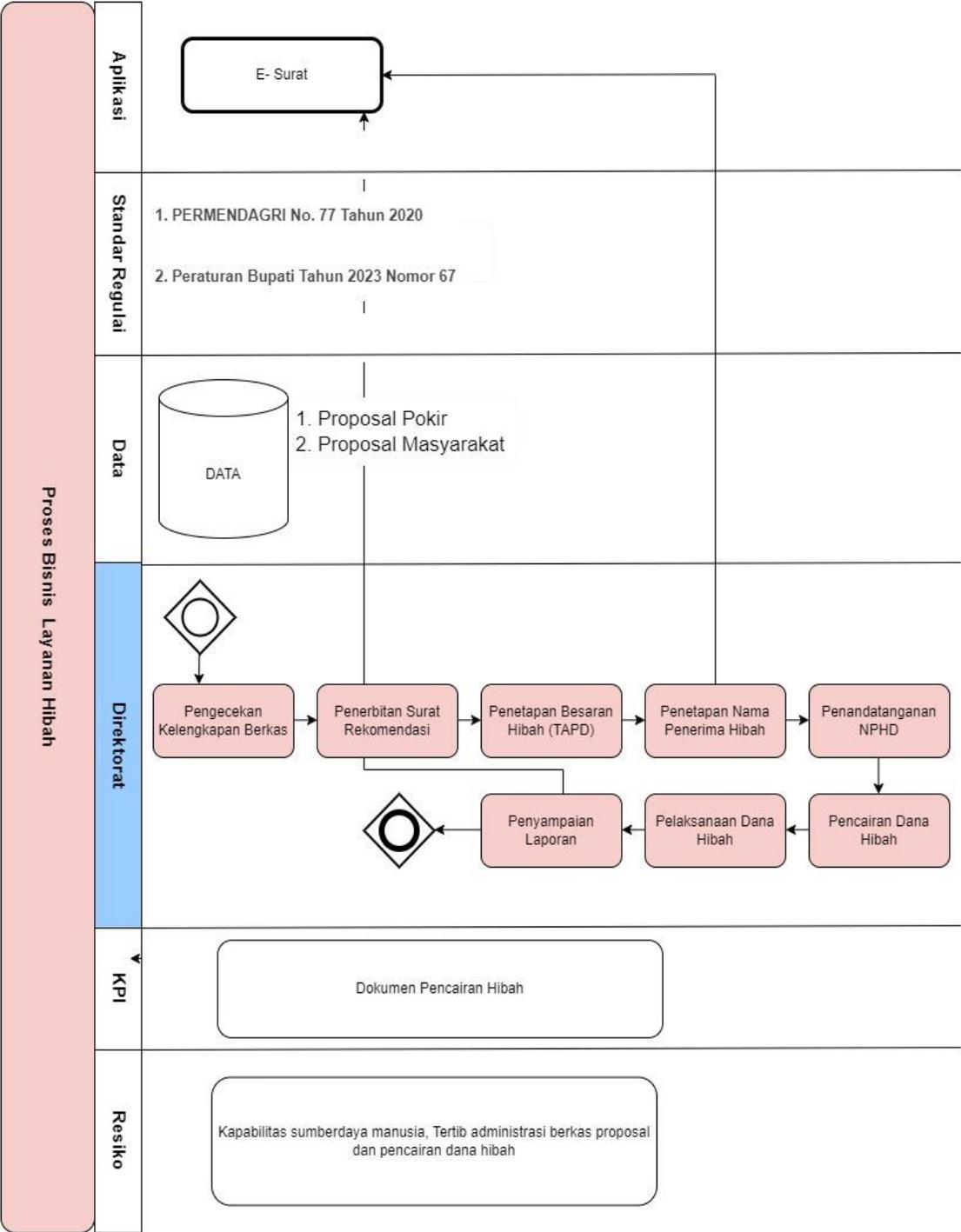


PETA RELASI

Sasaran 1 : Meningkatnya fasilitasi kegiatan keagamaan.



Peta Sub Proses Bisnis Pendampingan Kegiatan Keagamaan (Hibah)



F. HAMBATAN RTL

Adapun hambatan dalam penyusunan RTL ini adalah:

1. Terbatasnya waktu dalam proses penyusunan RTL karena banyaknya kegiatan lapangan yang sedang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Informasi yang diperoleh kurang begitu lengkap dan jelas sehingga mengakibatkan kesulitan dalam menganalisa proses bisnis yang dikerjakan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Rencana Tindaklanjut (RTL) akan sangat membantu dalam menata ataupun membuat rencana kerja kedepan. Sehingga bidang pelayanan publik akan dapat melihat seberapa besar hasil kepuasan masyarakat yang didapat setelah adanya pemenuhan atau tindaklanjut dari berbagai bidang yang kurang maksimal. Selain itu juga dapat digunakan dalam evaluasi secara internal terhadap aparatur pemerintahan khususnya di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul. Rencana Tindaklanjut ini dibuat sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya RTL ini dapat dapat mendorong terciptanya inovasi, peningkatan komitmen dan peningkatan sistem pelayanan yang prima, cepat, aman efisien dan transparan.

B. SARAN

1. Melibatkan seluruh pegawai yang menangani proses pencairan dana hibah kelembagaan agama sehingga tidak ada proses yang terlewat dalam pembuatan proses bisnis.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul supaya terus berkomitmen untuk berinovasi dan berkolaborasi, untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik terus menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://greatnusa.com/>

<https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/11/proses-bisnis>

<https://dpmptsp.madiunkab.go.id/dokumen/skm/RTL>

LAMPIRAN 1 :

SCREENSHOOT SEMINAR



LAMPIRAN 2:

SLIDES PPT SEMINAR



slidesmania.com

PROSES BISNIS

LAYANAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT – FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN
(LAYANAN DANA HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN)

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN BANTUL



slidesmania.com

VISI DAN MISI

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

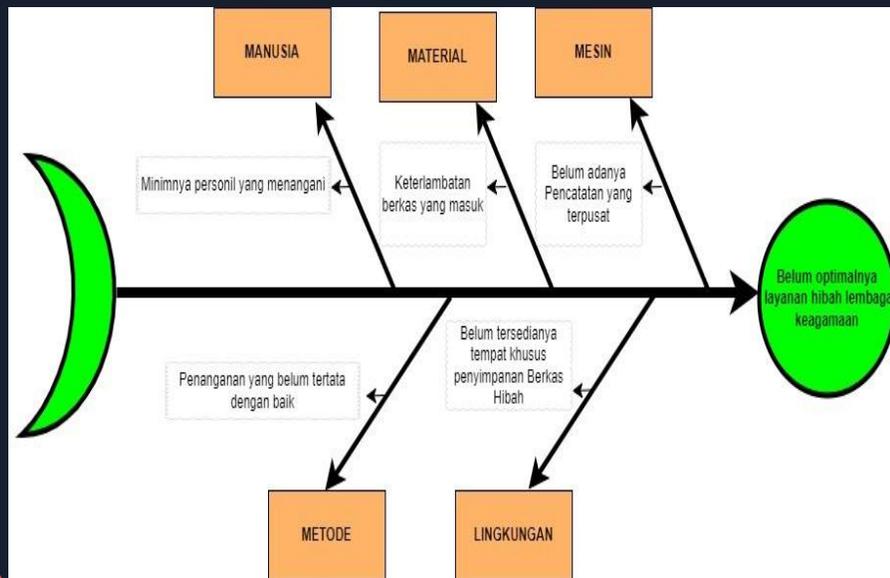
- ✓ Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
- ✓ Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
- ✓ Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
- ✓ Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
- ✓ Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Bagian kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021, Bagian Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekreteraris Daerah dan berada dalam koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok Prakom pada Bagian Kesejahteraan Rakyat antara lain:

- ✓ Melaksanakan perekaman data pada komputer
- ✓ Melaksanakan Pengandaan Data
- ✓ Melakukan Perekaman dengan Pemindaian

IDENTIFIKASI ISU



ANALISIS ISU

KEKUATAN

- ✓ Pegawai yang memadai
- ✓ Ketersediaan Anggaran

KELEMAHAN

- ✓ Ketergantungan terhadap penyediaan data dari satu instansi
- ✓ Perubahan data yang dinamis
- ✓ Kurang lengkapnya berkas pengajuan proposal
- ✓ Kurang lengkapnya berkas pencairan dana hibah
- ✓ Ketidaktepatan Waktu pengumpulan proposal

SWOT

PELUANG

- ✓ Pentingnya sebuah panduan layanan untuk memudahkan pegawai baru
- ✓ Memperpendek waktu layanan karna adanya panduan yang sudah jelas

ANCAMAN

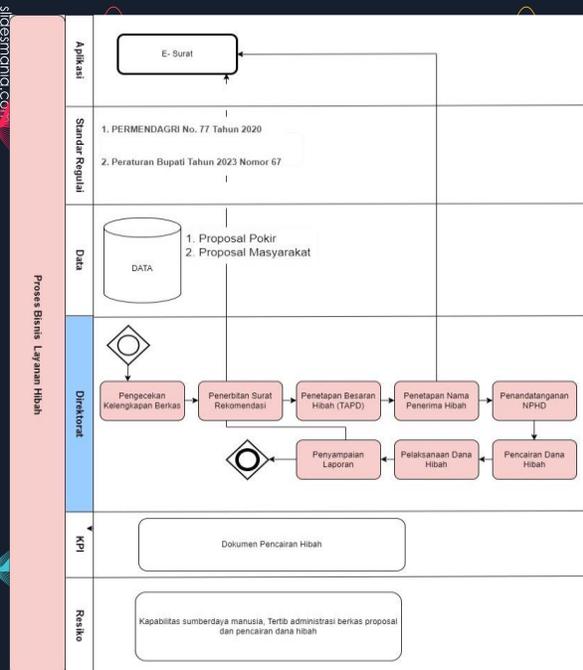
- ✓ Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang dinamis dapat mempengaruhi layanan

RANCANGAN RTL PEMBUATAN LAYANAN DANA HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN

| NO | NAMA KEGIATAN | PIHAK TERKAIT | WAKTU | OUTPUT KEGIATAN |
|----|---|--|-------------|--|
| 1 | Permintaan data dan informasi Penerimaan berkas hibah | Analisis Ahli Muda | 21 Mei 2024 | Alur Penerimaan proposal hibah |
| 2 | Pengecekan berkas Proposal hibah | Analisis Ahli Muda | 22 Mei 2024 | Data Kelengkapan Berkas hibah |
| 3 | Penerbitan surat rekomendasi | Bagian Administrasi | 23 Mei 2024 | Data Surat Rekomendasi |
| 4 | Pengajuan besaran hibah | Bendahara | 24 Mei 2024 | Besaran hibah dari TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) |
| 5 | Penetapan nama calon penerima hibah | Bagian Administrasi | 27 Mei 2024 | Nama-nama penerima hibah |
| 6 | Penandatanganan NPHD | Calon penerima hibah+ Bagian Administrasi | 28 Mei 2024 | Berkas siap dicairkan |
| 7 | Pencairan dana hibah | Calon penerima hibah+ Bagian Administrasi | 29 Mei 2024 | Kelengkapan Pencairan |
| 8 | Pelaksanaan dana hibah | Calon penerima hibah | 30 Mei 2024 | Kegiatan |
| 9 | Penyerahan laporan pertanggungjawaban | Calon penerima hibah + Bagian Administrasi | 30 Mei 2024 | Laporan kegiatan |

JADWAL KEGIATAN

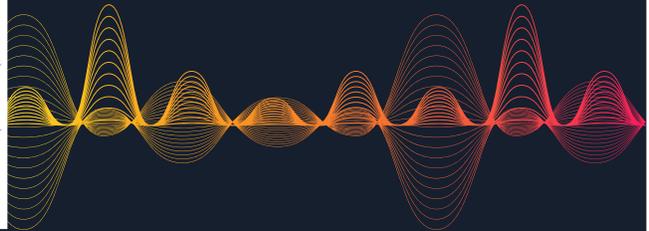
| NO | KEGIATAN | PELAKSANAAN |
|----|--|-------------------|
| 1 | Pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait | 21 – 30 Mei 2024 |
| 2 | Perancangan proses bisnis layanan bantuan dana hibah Lembaga keagamaan | 03 – 05 Juni 2024 |
| 3 | Penulisan Laporan | 6 – 7 Juni 2024 |



REALISASI DAN HAMBATAN RTL

HAMBATAN:

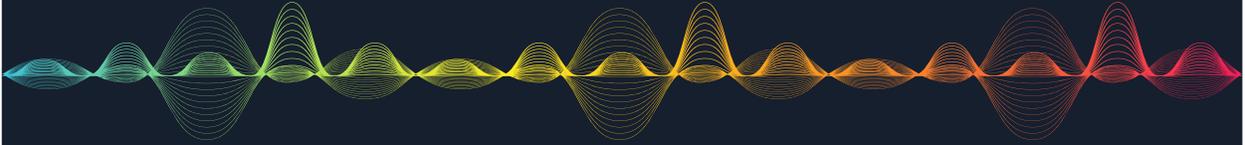
- ✓ Terbatasnya waktu dalam proses penyusunan RTL
- ✓ Informasi Proses alur layanan hibah belum sepenuhnya terkumpul.



KESIMPULAN DAN SARAN:

Rencana Tindaklanjut (RTL) akan sangat membantu dalam menata ataupun membuat rencana kerja kedepan. Sehingga bidang pelayanan publik akan dapat melihat seberapa besar hasil kepuasan masyarakat yang didapat setelah adanya pemenuhan atau tindaklanjut dari berbagai bidang yang kurang maksimal. Selain itu juga dapat digunakan dalam evaluasi secara internal terhadap aparatur pemerintahan khususnya di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul.

Melibatkan seluruh data kegiatan proses pencairan dana hibah Lembaga keagamaan sehingga tidak ada proses yang terlewat dalam pembuatan proses bisnis.



LAMPIRAN 3:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAUMI IMAYANTI, A.MD

PRANATA KOMPUTER

Kontak

Alamat Kantor

Jl. Rudolf Wolter Monginsidi No. 1
Bantul Yogyakarta

Email Kantor

Kesra@bantulkab.go.id

Telp. Kantor

0274- 367509

Email Pribadi

naumiimayanti@gmail.com

Profil

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, tepatnya di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul.

Riwayat Pekerjaan

CPNS 2021 - Sekarang

Sekretariat

Bertugas Sebagai Pranata Komputer Terampil pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul

Pendidikan

| | |
|------|---|
| 2000 | SD Muhammadiyah Blawong 1 |
| 2003 | MTsN Sumberagung Jetis Bantul |
| 2006 | SMAN 1 Jetis Bantul |
| 2009 | Universitas Respati Yogyakarta Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Manajemen Informatika |



Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
Pelatihan Peningkatan Kompetensi SPBE Bagi Pranata
Komputer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
Angkatan I Tahun 2024

